



RENCANA KERJA TAHUN 2024

**SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KATA PENGANTAR

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih terarah dan terukur akan lebih memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi lingkungan itu sendiri dan makhluk hidup di dalamnya. Oleh karenanya agar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat ditangani dengan baik setiap tahunnya, perlu disusun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2024 (Renja Ditjen PPKL Tahun 2024) dan Rencana Kerja Unit Direktorat lingkup Ditjen PPKL termasuk juga Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Renja Setditjen PPKL Tahun 2024). Secara substansial Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020–2024, Rencana Strategis Ditjen PPKL Tahun 2020–2024 dan Rencana Kerja Ditjen PPKL Tahun 2024.

Renja Setditjen PPKL Tahun 2024 memuat Pendahuluan, Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023, Rencana Kerja Tahun 2024, serta Penutup. Renja Setditjen PPKL Tahun 2024 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024 dan diharapkan dapat dilaksanakan oleh pimpinan dan staf lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara akuntabel.

Akhir kata, semoga dokumen Renja Setditjen PPKL Tahun 2023 ini dapat lebih meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan lingkup Ditjen PPKL khususnya Setditjen PPKL.

Jakarta, 27 Desember 2023

Sekretaris Ditjen Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan



Tulus Laksono
NIP. 19710713 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia	2
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023	4
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023.....	4
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023	6
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2024	7
A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional	7
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2024	8
BAB IV PENUTUP.....	10
Lampiran.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditjen PPKL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan tugas ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencapaian kinerja yang lebih luas berkaitan dengan isu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 telah disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan Nomor: P.13/PPKL/SET/REN.0/9/2020 tentang Renstra Ditjen PPKL Tahun 2020-2024, secara bertahap dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai target-target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja Tahun 2024 dilakukan agar pelaksanaan tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dijalankan dengan optimal sesuai dengan sistem penganggaran yang ada dan waktu pelaksanaan yang terbatas.

Secara umum, Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2024 (Renja Setditjen PPKL Tahun 2024) disusun untuk memperbaiki tata kelola pemerintah yang baik dengan melakukan dukungan manajemen yang efektif dan efisien lingkup Ditjen PPKL. Pencapaian indikator kinerja pada Renja Tahun 2024 menjadi landasan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Setditjen PPKL) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Sekretaris Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Tugas dan fungsi Setditjen PPKL diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Setditjen PPKL mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen PPKL. Fungsi Setditjen PPKL adalah:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
3. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
4. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, fasilitasi kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan direktorat jenderal.

C. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Setditjen PPKL mempunyai 2 (dua) bagian yaitu:

1. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik

Tugas Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik adalah melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

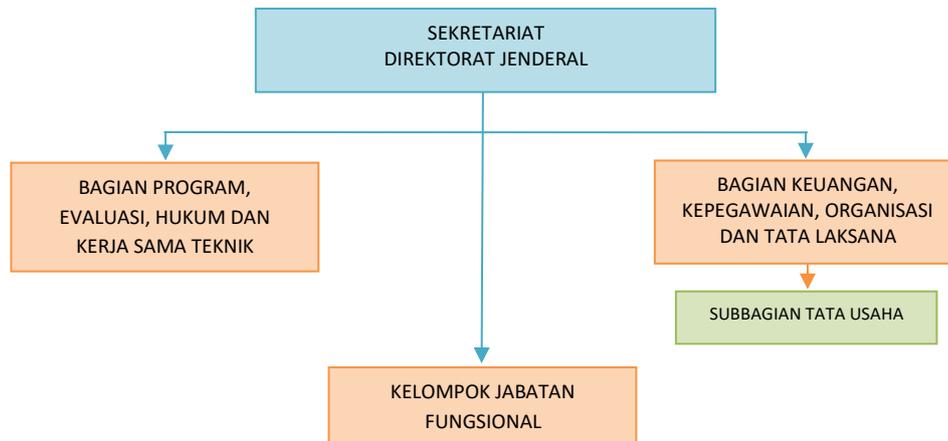
2. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Tugas Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap, struktur organisasi Setditjen PPKL dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen PPKL

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Setditjen PPKL sebanyak 77 pegawai, yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Secara rinci SDM Setditjen PPKL seperti terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Setditjen PPKL

Profesor	S3	S2	S1	D3 Sederajat	SLTA Sederajat	SLTP	SD	Jumlah	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	-	10	46	8	11	2	-	77	-

Sumber: Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

Indikator Kinerja Program (IKP) diturunkan dalam bentuk yang lebih terukur ke dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu percepatan implementasi Reformasi Birokrasi dengan indikator berupa nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 81,00 (A) di tahun 2022. Hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 sebesar 77,11 (Tabel 2), sedangkan capaian IKK pada tahun 2023 belum dapat diukur karena penilaian SAKIP belum dilaksanakan. Terjadi perubahan target SAKIP untuk tahun 2023 yang semula 82 poin menjadi 78 poin. Perubahan target disebabkan karena terdapat metode baru perhitungan SAKIP sesuai PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Tabel 3).

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Capaian	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan nilai minimal 81,00 (A) di tahun 2022	Poin	81	77,11	95,20

Tabel 3. Prognosis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Setditjen PPKL Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Prognosis 2023	
			Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Poin	78	78
	Level Maturitas SPIP Ditjen PPKL	Level	3	3
	Laporan Keuangan Direktorat	Laporan	1	1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Prognosis 2023	
			Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
dan Kerusakan Lingkungan	Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang tertib dan akuntabel			

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

Anggaran DIPA Setditjen PPKL tahun 2022 sebesar Rp. 61.339.178.000,- (enam puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Realisasi anggaran sebesar Rp. 59.598.978.403,- (lima puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah), sehingga capaian penyerapan anggaran Setditjen PPKL tahun 2022 sebesar 97,16%. Untuk tahun 2023, pagu awal sebesar Rp. 61.154.903.000,- (enam puluh satu milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), kemudian direvisi menjadi Rp. 61.879.453.000,- (enam puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan prognosis serapan anggaran sebesar 98,25%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Serapan Anggaran Setditjen PPKL Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Output	Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022			Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2023		
		Pagu (Rp)	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Layanan Umum	15.273.572.000,-	14.854.449.850,-	97,26	13.612.797.000,-	13.325.566.983,-	97,89
	Layanan Perkantoran	46.065.606.000,-	44.744.528.553,-	97,13	48.266.656.000,-	47.378.549.530,-	98,16
	Total	61.339.178.000,-	59.598.978.403,-	97,16	61.879.453.000,-	60.704.116.513,-	98,10

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pagu anggaran Setditjen PPKL tahun 2023 lebih besar dibandingkan tahun 2022. Peningkatan pagu tahun 2023 terdapat pada output layanan perkantoran akibat penambahan jumlah pegawai sebanyak 23 orang dari sejumlah 269 orang pada tahun 2022 menjadi 292 orang pada tahun 2023, sehingga menambah pagu belanja pegawai. Untuk itu, serapan anggaran tahun 2023 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 1% dibandingkan tahun 2022.

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2024

A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Untuk menjamin tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 dengan indikator-indikator yang bisa diukur setiap tahunnya, pada tahun 2024 arah kebijakan yang dilakukan Setditjen PPKL kepada dukungan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran unit kerja lingkup Ditjen PPKL dalam arah kebijakan nasional “*Money Follow Program*” dan kebijakan dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penyusunan NSPK, adaptasi sistem dan persiapan data dasar dalam pelaksanaan kegiatan serta program yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun hingga tahun 2024, dan pelaksanaan perbaikan hingga ke tingkat tapak. Dengan adanya perubahan kebijakan nasional dari *money follow function* menjadi *money follow program*, Setditjen PPKL dituntut untuk dapat membantu direktorat teknis dalam melakukan penyiapan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya hingga Tahun 2024. Hal ini bertujuan agar direktorat teknis dapat fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas lingkup Ditjen PPKL hingga ke tingkat tapak. Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL mempunyai peran koordinasi, fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis dan dukungan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PPKL. Adapun beberapa strategi yang dilakukan oleh Setditjen PPKL dalam melaksanakan kegiatannya diantaranya:

- Meningkatkan efektivitas perencanaan program, evaluasi, pelayanan dan pembinaan hukum serta fasilitasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri;
- Meningkatkan efektivitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana;
- Meningkatkan efektivitas peningkatan kinerja industri dalam pengelolaan lingkungan hidup.

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2024

Sekretariat Ditjen PPKL menjadi penanggungjawab kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan unit kegiatan dan elemen kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Perencanaan program, evaluasi, pelayanan dan pembinaan hukum serta fasilitasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri	Penyusunan dokumen perencanaan	10 Dokumen
			Penyusunan dokumen pelaporan	19 Dokumen
			Layanan kehumasan	24 Publikasi
			Layanan data dan informasi	1 Laporan
			Penataan peraturan perundang-undangan	60 Dokumen
			Fasilitasi layanan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional	60 Dokumen
			Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	4 Dokumen
			Perjanjian teknik dan rekapitulasi layanan kerja sama dalam dan luar negeri	10 Dokumen
			Pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik	1 Laporan
			Kesekretariatan PROPER	3.750 Industri
			Kesekretariat IKLH	38 Provinsi; 514 Kab/Kota
			Pelaksanaan SAKIP	17 Laporan
			Pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana	Penyusunan Laporan Keuangan
		Pengelolaan Keuangan		12 Laporan
		Pengelolaan BMN		5 Laporan
		Layanan Rumah Tangga		8 Laporan
		Pengelolaan Kepegawaian		2 Laporan
		Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan		1 Laporan
		Layanan Persuratan		100%
		Layanan Kearsipan		1 Laporan
		Pelaksanaan SPIP		5 Laporan
		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		1 Laporan

Capaian sasaran kegiatan diukur menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan target yang terukur dan telah ditetapkan. Adapun IKK Sekretariat Ditjen PPKL Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PPKL Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Poin	79
	Level Maturitas SPIP Ditjen PPKL	Level	4
	Laporan Keuangan yang tertib dan akuntabel	Laporan	1

Target SAKIP Ditjen PPKL tahun 2024 mengalami perubahan karena terdapat metode baru perhitungan SAKIP sesuai PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Oleh karena itu, menyesuaikan dengan hasil evaluasi Penilaian Mandiri (PM) SAKIP Ditjen PPKL 2023 sebesar 79,11 maka target SAKIP 2024 yang semula 83 poin berdasarkan Renstra Ditjen PPKL 2020-2024 direvisi menjadi 79 poin.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan tak hanya semangat dan komitmen untuk mendorong perubahan, akan tetapi menjadi media yang dapat memandu setiap langkah dalam memenuhi kinerja KLHK dan Ditjen PPKL melalui peran Sekretariat Ditjen PPKL. Selain itu, dokumen Renja ini diharapkan menjadi arahan dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2024 oleh seluruh unit kerja yang ada di Setditjen PPKL. Selanjutnya, seluruh kegiatan yang ada pada setiap unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya dalam mendukung pemenuhan kinerja secara langsung. Pemantauan kinerja ini akan dilakukan oleh Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik Sekretariat Ditjen PPKL dalam bentuk pemantauan dan evaluasi kinerja kegiatan yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan perbaikan koordinasi pemantauan kinerja yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj).

Lampiran 1. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2024

Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Program : Dukungan Manajemen
 Sasaran Program : Meningkatkan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien

Indikator Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu (Rp)
1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; 2. Level Maturitas SPIP Ditjen PPKL; 3. Laporan Keuangan yang tertib dan akuntabel,	Perencanaan program, evaluasi, pelayanan dan pembinaan hukum serta fasilitasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri	Efektivitas perencanaan program, evaluasi, pelayanan dan pembinaan hukum serta fasilitasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri	Penyusunan dokumen perencanaan	10 Dokumen	DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur)	2.871.309.000,-
			Penyusunan dokumen pelaporan	19 Dokumen	DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur)	293.460.000,-
			Layanan kehumasan	24 Publikasi	DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur)	1.686.500.000,-
			Layanan data dan informasi	1 Laporan	DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur)	13.500.000,-
			Penataan peraturan perundang-undangan	60 Dokumen	DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur)	288.320.000,-
			Fasilitasi layanan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional	60 Dokumen	DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur)	106.900.000,-
			Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	4 Dokumen	DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur)	104.780.000,-
			Perjanjian teknik dan rekapitulasi layanan kerja sama dalam dan luar negeri	10 Dokumen	DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur)	269.700.000,-
			Pemantauan dan evaluasi kerja sama teknik	1 Laporan	DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur)	230.300.000,-
			Kesekretariatan PROPER*)	3.750 Industri	38 Provinsi; 514 Kab/Kota	<i>Diblokir</i>
			Kesekretariat IKLH	38 Provinsi; 514 Kab/Kota	38 Provinsi; 514 Kab/Kota	200.000.000,-
			Pelaksanaan SAKIP	17 Laporan	DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur)	206.540.000,-
			Pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana	Efektivitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana	Penyusunan Laporan Keuangan	8 Laporan
	Pengelolaan Keuangan	12 Laporan			DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur)	43.429.522.000,-
	Pengelolaan BMN	5 Laporan			DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur)	1.207.450.000,-
	Layanan Rumah Tangga	8 Laporan			DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur)	9.958.554.000,-
	Pengelolaan Kepegawaian	2 Laporan			DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur)	800.000.000,-

Indikator Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu (Rp)
		laksana	Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	1 Laporan	DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur)	100.000.000,-
			Layanan Persuratan	100%	DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur)	24.000.000,-
			Layanan Kearsipan	1 Laporan	DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur)	200.000.000,-
			Pelaksanaan SPIP	5 Laporan	DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur)	200.000.000,-
			Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	DKI Jakarta (Kota Jakarta Timur)	100.000.000,-
					TOTAL	62.412.721.000,-

Keterangan:

*) Menggunakan anggaran Dit. PPA

Lampiran 2. Pohon Kinerja Setditjen PPKL Tahun 2024

